

Demokrat Sambut Baik Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati

JAKARTA (IM) - Partai Demokrat menyambut baik rencana pertemuan Presiden terpilih 2024-2029 sekaligus Ketua Partai Gerindra, Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Partai Demokrat menilai jika pertemuan keduanya teralisasi akan berdampak positif bagi perpolitikan nasional.

"Kami senantiasa menyambut baik dan merespon positif terhadap silaturahmi antar tokoh dan pemimpin bangsa. Jika pertemuan Pak Prabowo selaku Presiden terpilih dengan Ibu Megawati Presiden ke-5 RI ini teralisasi tentu saja akan berdampak positif bagi kehidupan perpolitikan nasional, termasuk dalam jangka pendek ini akan mengakselerasi rekonsiliasi politik pasca Pilpres," kata Deputi Bapil DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, saat dihubungi, Sabtu (30/3).

Menurut Kamhar, pertemuan presiden terpilih dengan presiden sebelumnya diperlukan. Bahkan kata Kamhar, Prabowo sempat mewacanakan agar dibentuk lembaga.

"Pertemuan antara Presiden terpilih dengan tokoh-tokoh bangsa yang

pernah menjadi Presiden memang diperlukan. Ini juga sering disampaikan Pak Prabowo pada berbagai kesempatan. Bahkan pernah ada wacana untuk dilembagakan," ujarnya.

Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo terkait komposisi koalisi. Dia yakin Prabowo lebih tahu apa saja yang perlu dilakukan untuk mendukung pemerintahannya nanti.

Sebelumnya, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani bicara soal rencana pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan presiden terpilih Prabowo Subianto.

"Insyaallah (pertemuan Megawati dan Prabowo)," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/3).

Puan juga mengatakan 'Insyaallah' saat ditanya soal apakah sudah ada pertemuan dengan Prabowo. Puan juga tak bicara banyak soal rencana PDIP ke depan, layaknya Prabowo diajak gabung pemerintah Presiden Jokowi pada 2019. ● han

Tim Ganjar Ngotot Minta Dugaan Pelanggaran TSM Agar Diadili MK

JAKARTA (IM) - Anggota Tim Hukum paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, Ali Lubis, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) tidak melanjutkan sidang sengketa pilpres jika yang diadili merupakan dugaan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM).

Namun Juru Bicara Tim Hukum paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Suparman Marzuki mengatakan, materi gugatan yang diajukan pihaknya merupakan penyalahgunaan wewenang melanggar asas dan prosedur pemilu yang diduga dilakukan oleh Presiden dan tak diatur dalam Undang-undang (UU) Pemilu.

"Materi yang dimohonkan 01 dan 03 adalah penyalahgunaan wewenang oleh Presiden berupa melanggar asas dan prosedur Pemilu dalam berbagai tindakan yang langsung atau tidak langsung mendukung dan atau menguntungkan 02. Tindakan demikian itu tidak diatur oleh UU Pemilu. Mungkin pembuat UU tidak membayangkan akan hal tersebut sehingga tidak dimuat dalam UU Pemilu," kata Suparman saat dihubungi wartawan, Sabtu (30/3).

Dengan tidak diaturnya dalam UU Pemilu, Suparman menuturkan MK berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Dia menilai gugatan yang diajukan pihaknya dan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) ke MK sesuai dengan konstitusional.

"Karena itu menjadi wenang MK untuk memeriksa, mengadili dan memu-

tusnya berdasar Pasal 22E (1) dan Pasal 24 C (1). Karena itu sekali lagi, MK berwenang, dan gugatan 01 dan 03 sudah benar, berdasar dan konstitusional," ujarnya.

Suparman menyampaikan MK punya dasar untuk mengadili pelanggaran terhadap asas dan prosedur Pemilu. Dia menyebut sengketa menjadi wewenang Bawaslu jika tidak lolos verifikasi sebagai calon peserta Pemilu atau dicoret dari daftar calon Peserta pemilu.

Sebelumnya, Ali Lubis, meminta MK tidak melanjutkan sidang sengketa pilpres jika yang diadili merupakan dugaan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM). Ali mengatakan hal itu sudah di luar kewenangan MK.

Ali mengungkit permohonan sengketa pilpres yang telah dilayangkan kubu paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD ke MK. Adapun agenda sidang di MK telah sampai pada tahap pembacaan jawaban pihak termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan pihak Bawaslu RI.

Ali merujuk pada ketentuan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Menurut dia, kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), bukan pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). ● han

KPK Berharap Kepindahan SYL ke Salemba Bukan Modus Hindari Aturan Tak Bisa Bawa HP

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap perpindahan Syahrul Yasin Limpo (SYL) ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba bukan untuk menghindari kondisi rumah tahanan (Rutan) Cabang KPK yang semakin ketat.

Seperti diketahui, SYL merupakan eks Menteri Pertanian ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Namun, ia meminta Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memindahkannya ke Salemba dengan alasan kesehatan.

"Tentu kami sih berharap bukan modus untuk menghindari hal-hal yang saya ini kan Rutan Cabang KPK sudah sangat ketat ya," ujar Ali kepada wartawan, Minggu (31/3).

Ali mengatakan, saat

ini KPK memang telah memperbaiki tata kelola dan pengamanan Rutan Cabang KPK. Perbaikan merupakan tindak lanjut atas evaluasi terhadap kasus pungutan liar (pungli) di Rutan KPK yang melibatkan kepala dan petugas rutan.

Pungli biasanya menyangkut penyelundupan handphone, makanan, rokok, mengisi daya, dan lainnya. Saat ini Rutan Cabang KPK sudah sangat ketat. Pihaknya telah memperbanyak pemasangan kamera pengawas atau CCTV, menugaskan orang-orang baru, melakukan mutasi, hingga memperbaiki standard operating procedure (SOP).

"Rutan cabang KPK sendiri saat ini sudah sangat diperketat. baik termasuk Hp atau pun kunjungan dan lainnya," tutur Ali. ● mei

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



PENYISIRAN MATERIAL SERPIHAN LEDAKAN GUDMURAH KODAM JAYA
Personel Kompi Penjinak Bahan Peledak Zeni TNI AD berusaha menjinakkan material diduga sisa bahan peledak dan amunisi dampak dari ledakan Gudang Munisi Daerah Kodam Jaya Ciangsana yang terlempar hingga perumahan Cluster Visalia di Perumahan Kota Wisata, Gunung Putri, Kab. Bogor, Jabar, Minggu (31/3). Penyisiran yang dilakukan dengan mobil penjinak bahan peledak, detektor, dan peredam ledakan dengan daya eksplosif tinggi tersebut bertujuan meminimalisir serpihan sisa ledakan pada Sabtu (30/3) petang agar tidak membahayakan warga.

Tim Hukum Ganjar Pranowo Tolak Hadirkan Megawati ke Persidangan di MK

Tim hukum paslon nomor 3, Ganjar-Mahfud MD, Maqdir sebut Megawati tidak melakukan pelanggaran apa pun dalam Pilpres 2024.

JAKARTA (IM) - Tim hukum pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menilai, tidak ada relevansinya jika Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dihadirkan dalam sidang sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan itu disampaikan tim hukum Ganjar-Mahfud, Maqdir Ismail, dalam menanggapi pernyataan anggota tim hukum pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Otto Hasibuan yang meminta Megawati dihadirkan di ruang sidang.

"Menurut hemat saya, ketika rekan Otto Hasibuan

meminta Ibu Megawati dihadirkan pasti tidak ada relevansinya," kata Maqdir Ismail kepada wartawan, Minggu (31/3).

Maqdir menilai, Megawati Soekarnoputri tidak melakukan pelanggaran apa pun dalam Pilpres 2024. Hal ini dapat terlihat dari tindakan dan ucapan Megawati sebagai Ketua Umum Partai Politik selama proses Pilpres 2024 ini.

"Tidak ada tindakan Ibu Megawati yang salah atau melanggar etika selama masa kampanye, tidak juga ada ucapan atau perbuatan dari Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI-P yang berlebihan atau melanggar kepatutan," ucapnya.

Maqdir pun menyarankan Otto Hasibuan untuk me-

minta Hakim Konsitusi menghadirkan Presiden Joko Widodo di muka persidangan. Menurut dia, Kepala Negara dapat memberikan keterangan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah untuk memenangkan pasangan Prabowo-Gibran.

"Menurut hemat saya mesti rekan Otto Hasibuan meminta izin kepada majelis hakim agar menghadirkan Presiden Joko Widodo dan nanti nanti Beliau diminta untuk menerangkan alasan beliau ikut cawe-cawe dalam pembagian bansos," kata Maqdir.

"Diminta pula alasan dari Presiden membagi-bagi bansos di depan Istana dan di tempat-tempat tertentu," ucapnya.

Maqdir pun menyinggung cawe-cawe Kepala Negara untuk Prabowo dalam masa kampanye Pilpres 2024. Misalnya, minum degan atau kelapa muda di Magelang bersama. Selain itu, Presiden dinilai menjelaskan alasan penyaluran cadangan pangan

oleh Badan Pangan Nasional bukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Padahal, Kemensos merupakan lembaga yang mempunyai tugas pokok membagikan segala bentuk bantuan negara kepada masyarakat. Apalagi, selama ini, Kemensos juga sudah mempunyai dokumentasi penerimaan dan sudah mencatat seluruh penerima bantuan tersebut.

"Kami juga sedang mempertimbangkan sekarang, apakah kami nanti akan juga memohon agar Ibu Megawati umpamanya, atau umpamanya pimpinan-pimpinan partai yang lain, atau tokoh-tokoh yang lain akan bisa masuk menjadi pihak dalam perkara ini," kata Otto dalam dalam program Kompas Petang Kompas TV, Jumat (29/3).

Menurut Otto, pihaknya menemukan indikasi kecurangan pilpres yang dilakukan oleh kubu lawan. Oleh karenanya, keterangan Megawati dan elite partai politik lain mereka nilai penting untuk mengusut keterkaitan tokoh-

tokoh tersebut dengan dugaan kecurangan pemilihan.

"Kalau ini terjadi, maka perkara ini akan sangat menarik. Pihak 01 (Anies-Muhaimin) meminta empat menteri (dihadirkan dalam sidang di MK), kami juga meminta Ibu Megawati, tokoh-tokoh lain. Nanti tergantung hakim, ia menerima yang mana," ujar Otto.

Otto pun mengaku tak masalah seandainya MK menggabungkan permintaan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud untuk menghadirkan para menteri Kabinet Indonesia Maju guna memberikan keterangan terkait bansos. Namun, menurutnya, bansos yang digulirkan oleh pemerintahan Jokowi jelang hari pemungutan suara Pilpres 2024 tak ada kaitannya dengan kemenangan Prabowo-Gibran.

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) itu menyatakan, tuduhan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud soal politisasi bansos bersifat asertif. ● han



KECAMATAN PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN

MENGUCAPKAN

SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI

1 SYAWAL 1445 H

"MINAL AIDIN WAL FAIZIN"



H. Mukroni, SE.M.Si.Kp
Camat Pamulang



Munadi, SE.M.Si
Sekcam Pamulang